

**ANALISIS TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KABUPATEN/ KOTA DI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**(Studi Kasus Pada Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang Pada
Tahun 2019-2021)**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Akhir Program Studi Akuntansi (DIII) Sebagai
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



OLEH:

DIFA AULIA RAMAHDANI AGUS

19133020/2019

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2023

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KABUPATEN/ KOTA DI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

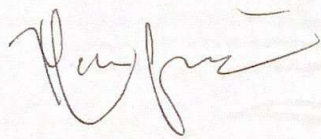
**(Studi Kasus Pada Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang Pada
Tahun 2019-2021)**

Nama : Difa Aulia Ramahdani Agus
Nim : 19133020
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Falkutas : Ekonomi

Padang, 5 Juni 2023

Diketahui Oleh
Ketua Prodi

Disetujui Oleh
Pembimbing



Halkadri Filra, SE, MM, Ak, Ca
NIP. 198008092010121003



Nurzi Sebrina, SE, M. Sc, Ak
NIP. 197209101998022003

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KABUPATEN/ KOTA DI
PROVINSI SUMATERA BARAT

(Studi Kasus Pada Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang Pada
Tahun 2019-2021)

Nama : Difa Aulia Ramahdani Agus

Nim : 19133020

Program Studi : Akuntansi (DIII)

Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 9 Juli 2023

Tim penguji

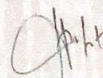
Nama

Tanda Tangan

1. Nurzi Sebrina, SE, M. Sc, Ak (Ketua)



2. Mayar Afriyenti, SE, M.Sc (Anggota)



3. Vita Fitria Sari, SE, M.Si (Anggota)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Difa Aulia Ramahdani Agus
Tahun Masuk/NIM : 2019/19133020
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/20 November 2001
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Diploma
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Perumahan Wisma Bumi Mas Blok D/8 Kuranji
Judul Tugas Akhir : Studi Ekploratif Terhadap Temuan Pemeriksaan Temuan BPK RI Atas Sistem Pengendalian Internal Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang Tahun 2019-2021)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 20 Juli 2023

Difa Aulia Ramahdani Agus
NIM. 19133020

ABSTRAK

Difa Aulia Ramahdani Agus	:	Analisis Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK RI Atas Sistem Pengendalian Internal Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang Tahun 2019- 2021)
Pembimbing	:	Nurzi Sebrina, SE, M. Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis temuan atas sistem pengendalian internal pada kabupaten/kota di Sumatera Barat. Objek penelitian ini adalah 2 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat yang dipilih sebagai perbandingan antara kabupaten dan kota. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan hasil BPK Sumatera Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode content analysis (analisis isi). Hasil penelitian menunjukkan masih banyak temuan BPK atas unsur-unsur sistem pengendalian internal pada kabupaten/kota di Sumatera barat dan tidak terdapat perbaikan pada sistem pengendalian internal di tahun yang akan datang.

Kata kunci : Sistem Pengendalian Internal, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Analisis Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK RI Atas Sistem Pengendalian Internal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Pada Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang Tahun 2019-2021)”** dengan baik serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah memberikan akhlakul karimah bagi seluruh penjurur dunia. Tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya dari Program Studi Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan kali ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan serta dukungan dalam dalam menyelesaikan Tugas Akhir, yaitu kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran disetiap kesulitan yang penulis hadapi.
2. Teristimewa kepada kedua orang tua saya Ayahanda Agusmar dan Ibunda Mariani, serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk moral juga material dan selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

3. Bapak Dr. Idris M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Halkadri Fitra SE, MMk. Ak, CA selaku Ketua Program Studi D III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Nurzi Sebrina SE., M. Sc., Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya yang memberikan arahan, bimbingan, saran, serta nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan waktu yang telah ditentukan.
6. Bapak Henri Agustin SE, M.SC. AK selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Diploma III Akuntansi dan program studi lainnya di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah berbagi ilmu dan membimbing penulis selama perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Bidang Humas di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang telah membantu penulis dalam pengambilan data selama penelitian.
9. Terima kasih untuk teman-teman tersayang Faradilla Azhari, Husna Nadia Putri, Malla Cantika, Winti Febriani, Cindy Mulia Andeta, dan Azizah Fanira Sari teman seperjuangan tugas akhir yang telah memberikan semangat, bantuan dan selalu setia dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kita bisa sukses setelah ini. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin’.
10. Terima kasih kepada Nia Ratnasari, Azizah Permata Sari, Tri Afsah Nurmaitno, Intan Dwi Putri dan Putri Salvina Ferza sebagai sahabat

seperjuangan yang telah banyak membantu, memberikan saran, memberikan semangat perhatian, serta dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir

11. Terima kasih kepada Annisa Azarin, Fadillah Savitri, latifah gusti, Reza, Irvan yang telah menjadi tempat berbagi canda dan tangis dalam penyelesaian tugas akhir ini

12. Terima kasih kepada busuk family Muhammad Fadhilah Rizki, Indie Rahmawati, Anindya Radita Maiziyah, Yelia Findy Tiara, Rahma Zelvira, Al Ghiffari, Mato Ariku, Ariq Fadhlurrahman, Rehanda Budi Pratama, Cut Amanda, Chintia Faras Yolanda, Patricia Nola, Gerry Rifqi Haadi, Wahyudi Al Islami.

13. Terima kasih kepada senior Fahrel Andhika Feonda, dan Muhammad Dawam Alfajri yang telah memberikan saran kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini

14. Semua teman-teman seperjuangan khusus Diploma III Akuntansi 2019 yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan semangat yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT. Penyusunan Laporan Tugas Akhir tentunya masih banyak terdapat kekurangan, kesalahan dan kekhilafan karena keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu sebelumnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan yang bersifat membangun atas laporan ini.

Akhir kalimat dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun kita Bersama.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Teori Agensi.....	11
B. Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah....	12
C. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).....	13
D. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).....	15
E. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).....	19
F. Temuan Audit.....	21
G. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP).....	21
BAB III	23
METODE PENELITIAN	23
A. Bentuk Penelitian.....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
C. Rancangan Penelitian.....	23
D. Metode Analisis Data.....	25
BAB IV	27
PEMBAHASAN	27
A. Profil Pemerintah Daerah.....	27
1. Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	27
2. Kota Padang.....	32
B. Profil Instansi Pemerintah.....	38
1. Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Barat.....	38
C. Pembahasan.....	39
1. Temuan BPK RI atas 5 Unsur Sistem Pengendalian Intern pada Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang di Sumatera Barat Pada tahun 2019-2021.....	39
a. Tahun 2019.....	40
b. Tahun 2020.....	47
c. Tahun 2021.....	57

2. Sejauh mana perbaikan Sistem Pengendalian Intern pada Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang pada tahun berikutnya.....	68
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Opini BPK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021.	6
Tabel 4.1 Temuan BPK RI Atas Sistem Pengendalian Internal pada Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang pada unsur lingkungan pengendalian.....	40
Tabel 4.3 Temuan BPK RI Atas Sistem Pengendalian Internal Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang pada unsur informasi dan komunikasi.....	46
Tabel 4.4 Temuan BPK RI Atas Sistem Pengendalian Internal pada Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang pada unsur lingkungan pengendalian.....	47
Tabel 4.5 Temuan BPK RI Atas Sistem Pengendalian Internal pada Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang pada unsur kegiatan pengendalian.....	51
Tabel 4.6 Temuan BPK RI Atas Sistem Pengendalian Internal pada Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang pada unsur pemantauan.....	56
Tabel 4.7 Temuan BPK RI Atas Sistem Pengendalian Internal pada Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang pada unsur lingkungan pengendalian.....	57
Tabel 4.10 Temuan BPK RI Atas Sistem Pengendalian Internal pada Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang pada unsur kegiatan pengendalian.....	63
Tabel 4.12 Temuan BPK RI Atas Sistem Pengendalian Internal pada Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang pada unsur pemantauan.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	32
Gambar 4.2 Peta Kota Padang.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi otonomi daerah yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 menyebabkan perubahan penting dalam tata kelola keuangan pemerintah. Dengan dikeluarkannya salah satu ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggara Otonomi Daerah”, yang sebagai dasar hukum lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian diubah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mendelegasikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 23 Tahun 2014). Dengan adanya wewenang tersebut maka pemerintah daerah dituntut memberikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah.

Penyelenggara otonomi daerah memiliki tujuan utama salah satunya *good governance* yang didefinisikan oleh *World Bank* sebagai penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip pasar yang demokrasi dan efisien penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. (Mardiasmo, 2002)

Usaha dalam mencapai *good governance* dengan reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Rahmanurrajiid, 2008). Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan kepada masyarakat agar informasi yang terkandung dalam laporan tersebut harus benar-benar berkualitas hal ini sesuai PP Nomor 71 tahun 2010 laporan keuangan yang disusun harus: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan, (d) dapat dipahami. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar pemerintah yang mengacu pada peraturan daerah dan ketentuan perundang-undangan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hingga saat ini tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik menjadi sorotan masyarakat dikarenakan maraknya kasus korupsi di pemerintah yang sulit diberantas ataupun kecurangan yang dilakukan oleh oknum pemerintah yang banyak merugikan uang rakyat, Oleh karena itu pemerintah diminta keterbukaan terhadap publik atas segala hal yang berkaitan dengan pemerintah. Penguatan akuntabilitas dan transparansi sektor publik sebagai konsekuensi penting dari kebijakan pemerintah yang relevansinya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperkuat pengendalian internal pada organisasi sektor publik.

Upaya menegakkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) atas pertanggungjawaban terhadap masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kepada masyarakat. BPK melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kewajaran

penyajian laporan keuangan tersebut. Audit oleh BPK tidak hanya menghasilkan opini atas laporan keuangan yang diaudit tetapi juga memberikan catatan hasil temuan. Hasil audit keuangan oleh BPK menghasilkan output Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berupa opini atas laporan keuangan pada buku I, temuan atas kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Sistem pengendalian internal merupakan pokok penyelenggaraan kegiatan sehari-hari bagi pemerintah daerah, pentingnya sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien diterapkan pemerintah agar laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan dapat diandalkan. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern dalam peraturan pemerintah yang dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak. Berdasarkan pemikiran tersebut dikembangkan unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Unsur sistem pengendalian intern pada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 mengacu pada unsur pengendalian intern, yang meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan. Pelaksanaan sistem pengendalian intern bertumpu pada penguatan sistem pengendalian internal yang sudah terbangun yang dilaksanakan oleh seluruh pihak organisasi mulai dari adanya kebijakan, pembentukan organisasi, persiapan anggaran, sarana dan prasarana, penetapan personil yang melaksanakan penetapan prosedur dan *review* seluruh tahapan.

Sistem pengendalian internal memegang peranan kunci dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan. Bagi pemerintah daerah sistem pengendalian internal merupakan pokok dalam pengendalian kegiatan pemerintah. Sistem pengendalian menjadi faktor kunci keberhasilan setiap program yang telah dirancang pemerintah pada awal periode. Sistem pengendalian ini menjadi pedoman bagi pemerintah dalam melayani masyarakat. Kelemahan sistem keuangan pada instansi pemerintah selama ini terjadi karena lemahnya desain dan pelaksanaan sistem pengendalian internal (Kawedar,2010)

Kelemahan sistem pengendalian internal dapat dikelompokan sebagai kelemahan sistem pada sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur internal. Implikasi atas kelemahan SPI menimbulkan kerugian pada negara yang cukup besar. Disamping itu, merajalelanya tindak kecurangan (*fraud*) yang mengarah korupsi oleh oknum pemerintah, hingga saat ini dalam laporan keuangan pemerintah baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

masih banyak temuan penyelewengan/penyalahgunaan berikut masih banyaknya data tidak sesuai dengan semestinya, angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan, ada yang fiktif dan tidak berdasarkan bukti atau transaksi yang sebenarnya. Atas beragamnya penyimpangan tersebut disimpulkan pelanggaran atas pengelolaan SPI pada lingkungan pemerintah belum efektif, masih banyak temuan sehingga kendala laporan keuangan diragukan karena penyelenggara sistem pengendalian internal tersebut belum berjalan semestinya (Vita,2018).

Hasil pemeriksaan BPK tahun 2019 mengungkapkan 5.367 permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI), yang mencakup 1.669 (32%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.498 (46%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.170 (22%) permasalahan struktur pengendalian intern pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Pemerintah Daerah Indonesia Pemerintah Daerah Indonesia Per 30 Juni 2021, BPK telah menyampaikan 58.442 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2000 sampai semester I 2021 kepada entitas yang diperiksa sebanyak Rp21,80 triliun. Hasil pemantau tindak lanjut rekomendasi periode 30 Juni 2021 telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 21.942 rekomendasi (37,5%) sebesar Rp4,41 triliun, belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 23.445 rekomendasi (40,1%) sebanyak Rp6,67 triliun, rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 13.048 rekomendasi (22,3%) sebanyak Rp10,72 triliun, rekomendasi tindak lanjut ditindaklanjuti sebanyak 7 rekomendasi (0,1%) sebanyak Rp203,65 juta (LHPS I, 2021).

Berdasarkan data diatas tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPK yaitu sebesar 37,5% dan sisanya sebesar 62,5% belum dilakukan tindak lanjut serta tidak dapat ditindaklanjuti hasil rekomendasinya oleh pihak BPK. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah atau pihak yang bertanggung jawab pada suatu instansi tersebut kurang tanggap atau kurang peduli terhadap apa yang sudah direkomendasikan oleh BPK atas temuan untuk periode berikutnya.

Berikut perkembangan opini yang diberikan oleh BPK atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019-2021.

Tabel 1.1 Perkembangan Opini BPK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021

No	Nama Entitas	Opini		
		TA 2019	TA 2020	TA 2021
1	Prov. Sumatera Barat	WTP	WTP	WTP
2	Kota Padang	WTP	WTP	WTP
3	Kota Bukittinggi	WTP	WTP	WTP
4	Kota Padang Panjang	WTP	WTP	WTP
5	Kota Pariaman	WTP	WTP	WTP
6	Kota Payakumbuh	WTP	WTP	WTP
7	Kota Sawahlunto	WTP	WTP	WTP
8	Kota Solok	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Agam	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Dharmasraya	WTP	WTP	WTP
11	Kab. Kep. Mentawai	WTP	WDP	WDP
12	Kab. Lima Puluh Kota	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Padang Pariaman	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Pasaman	WTP	WTP	WTP
15	Kab. Pasaman Barat	WTP	WTP	WTP
16	Kab. Pesisir Selatan	WTP	WTP	WTP
17	Kab. Sijunjung	WTP	WTP	WTP
18	Kab. Solok	WTP	WTP	WTP
19	Kab. Solok Selatan	WTP	WTP	WTP
20	Kab. Tanah Datar	WTP	WTP	WTP

Sumber: Rangkang Data BPK RI Wilayah Sumbar (data diolah,2022)

Kriteria pemberian opini salah satunya adalah pemeriksaan atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Hasil pemeriksaan BPK atas sistem pengendalian intern pemerintah daerah tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan dinyatakan dalam jumlah temuan SPI, semakin banyak jumlah temuan menunjukkan semakin lemah Sistem Pengendalian Intern yang terdiri dari kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern.

Objek penelitian ini adalah efektivitas pengendalian internal pemerintah dengan menggunakan laporan temuan atas kelemahan Sistem Pengendalian Internal yang dipaparkan dalam buku II sebagai data dalam penelitian ini. Efektivitas SPI merupakan salah satu kriteria yang digunakan oleh BPK dalam meneliti kewajaran informasi keuangan sesuai pasal 16 tahun 1 UU Nomor 15 Tahun 2004.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai temuan pemeriksaan SPI, diantaranya oleh Atyanta (2021) menyimpulkan bahwa tidak efektifnya SPI disebabkan dari kelemahan yang dimiliki oleh LKPD, yaitu terletak pada sistem pengendalian pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja. Permasalahan lain adalah lemahnya pengawasan dan pengendalian kegiatan oleh pejabat yang bertanggungjawab, hal ini diduga karena masih banyak yang belum memahami aturan dan belum adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Berdasarkan rendahnya tindak lanjut atas temuan audit dan penelitian sebelumnya yang relevan peneliti ingin menganalisis lebih lanjut atas temuan

hasil pemeriksaan BPK khususnya terkait dengan temuan kelemahan sistem pengendalian internal, penelitian, penelitian ini berfokus pada temuan sistem pengendalian internal 2 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2021.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 2 kabupaten/ kota yang sudah di audit oleh BPK RI. Alasan pemilihan sampel dilakukan sebagai perbandingan kabupaten dan kota, alasan pemilihan Kabupaten Kepulauan Mentawai dikarenakan Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan opini selama 2 tahun, pada tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh opini WTP sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh opini WDP dan pemilihan kota Padang dikarenakan Kota Padang berhasil mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut dibandingkan kota-kota lain yang berada di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK RI Atas Sistem Pengendalian Internal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Kabupaten Kep Mentawai dan Kota Padang 2019-2021).*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka hal yang akan diangkat penulis sebagai rumusan masalah pada penulisan ini adalah:

1. Bagaimana temuan BPK atas 5 unsur Sistem Pengendalian Intern pada Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang di Sumatera Barat pada tahun 2019-2021 ?
2. Sejauh mana perbaikan Sistem Pengendalian Intern pada kabupaten Mentawai dan kota Padang pada tahun berikutnya?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui temuan BPK atas 5 unsur yang ada dalam sistem pengendalian intern
2. Untuk mengetahui apakah adanya perbaikan sistem intern pada kabupaten/kota pada tahun berikutnya.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberi informasi yang berguna bagi penulis, pemerintah daerah dan pihak lain yang membaca, adapun manfaat penulis harapkan yaitu:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis terhadap sistem pengendalian intern misalnya tujuan pengendalian intern, unsur-unsur pengendalian intern dan impek Sistem Pengendalian Intern terhadap Kabupaten dan Kota yang ada di Sumatera Barat. Diharapkan dalam melakukan penelitian ini peneliti dapat mendalami ilmu teoritis memperluas wawasan atas hasil fenomena yang telah diteliti.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan referensi dan masukan untuk menganalisis temuan unsur Sistem Pengendalian Internal pada pemerintah daerah.

3. Bagi Akademis

Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Universitas Negeri Padang.

4. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan yang berguna dalam menambahkan pengetahuan dan referensi bagi penelitian yang akan melakukan penelitian ini di masa yang akan datang.